

INVENTARISASI PENGAJIAN PRODUK HUKUM TAHUN 2018

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PELAKSANAAN	HASIL KAJIAN	OUT PUT
1.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2013	Biro Organisasi SETDA	15 Januari 2018	Adanya perkembangan pengaturan pakaian dinas missal: a. Pakaian adat b. Penggunaan pakaian korpri c. Pakaian khusus di Perangkat Daerah d. Penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah	Nota Dinas Kepala Biro Hukum Nomoe 77/KL/HK/II/2018 tanggal 7 Pebruari 2018 perihal Pengkajian Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pekaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan Ternak di Provinsi Jawa Tengah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	20 Pebruari 2018	Perlu pencabutan atas Perda dimaksud karena tidak sesuai dengan : 1. UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0003437 tanggal 26 Pebruari 2018 perihal Hasil Pengkajian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1995

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PELAKSANAAN	HASIL KAJIAN	OUT PUT
3.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerag	BPKAD	20 Pebruari 2018	<p>Perlu dicabut, karena tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0003442 tanggal 26 Pebruari 2018 perihal Hasil Pengkajian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2003

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PELAKSANAAN	HASIL KAJIAN	OUT PUT
4.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang di Jalan	Dinas Perhubungan	1 Maret 2018	Perlu pencabutan atas Perda dimaksud karena tidak sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0003439 tanggal 2 Maret 2018 perihal Hasil Pengkajian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012
5.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi di Provinsi Jawa Tengah	Dinas ESDM	1 Maret 2018	Perlu pencabutan atas Perda dimaksud karena tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0003430 tanggal 2 Maret 2018 perihal Hasil Pengkajian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012
6.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi	Dinas PUS SDA Dan Penataan Ruang	2 Maret 2018	Perlu pencabutan atas Perda dimaksud karena tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0003430 tanggal 3 Maret 2018 perihal Hasil Pengkajian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PELAKSANAAN	HASIL KAJIAN	OUT PUT
7.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	BPPD	2 Maret 2018	Perlu pencabutan atas Perda dimaksud karena tidak sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0003440 tanggal 3 Maret 2018 perihal Hasil Pengkajian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2003
8.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Biro Organisasi SETD	31 Juli 2018	<p>Perlu penyesuaian dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan peraturan peruruan seperti UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas 2. Perkembangan keadan misalnya penggunaan media elektronik dan media social dalam 	Nota Dinas Kepala Biro Hukum Nomor 359/KL/HK/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Pengkajian Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PELAKSANAAN	HASIL KAJIAN	OUT PUT
				penyebarluasan ketatanaskahdinasan 3. Hal-hal teknis lainnya missal pengamanan dan pengendalian naskah dinas	
9.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kerjasama Daerah	Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama SETDA	14 September 2018	Perlu ditinjau kembali karena : 1. perkembangan peraturan perundang-undangan, antara lain diundangkannya PP Nomor 28 Tahun 2018 2. hal-hal teknis lainnya antara lain ketatanaskahdinasan dalam naskah kerjasama	Nota Dinas Kepala Biro Hukum Nomor 415/KL/HK/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 perihal Pengkajian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
10.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja RSUD/RSJD Provinsi Jawa Tengah	Biro Organisasi	12 Oktober 2018	Perlu ditinjau kembali sehubungan dengan: 1. perkembangan keadaan : jenis dan klasifikasi RS, noemklatur 2. perkembangan	Nota Dinas Kepala Bagian Perundang-Undangan Nomor 20.1/Kl/Hk/Bag1/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 perihal Honor Pengkajian Peraturan

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PELAKSANAAN	HASIL KAJIAN	OUT PUT
				regulasi	Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah
11.	Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air	BPPD dan Dinas PU SDA TARU	26 Oktober 2018	Dengan ditetapkannya Permen PUPR, maka Dalam pelaksanaan penyusunan produk hokum di Provinsi Jawa Tengah tentang Nilai Air Permukaan Untuk Menghitung Air Permukaan perlu ditinjau kembali dengan tetap berpedoman pada ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0021171 tanggal 3 Desember 2018 perihal Hasil Pengkajian Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Air Permukaan